

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan devisa dari tenaga kerja atau migran yang mencari nafkah di luar negeri. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darusallam menjadi negara yang menampung banyak Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena pertimbangan kedekatan geografis. Menurut data yang dihimpun oleh Bank Indonesia, Malaysia menjadi negara yang paling banyak menampung TKW selama tahun 2010-2015. Singapura dan Brunei Darusallam menyusul Singapura menjadi negara dengan TKW terbanyak.

Tabel 1.1 : Jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Negara Penempatan

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ASEAN	2.064	2.075	2.110	2.134	2.109	2.038
Malaysia	1.898	1.897	1.916	1.941	1.892	1.881
Singapura	142	149	151	145	132	120
Brunei Darusallam	25	30	36	38	37	35
Negara ASEAN Lain	-	2	6	10	2	1

(Dalam Ribuan Orang).

Sumber : Bank Indonesia ¹

Remitansi yang Indonesia terima dari TKW mampu menyamai dari sektor ekonomi lain, seperti minyak dan gas (Migas). Menurut publikasi dari situs resmi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak tahun 2006 remitansi dari para TKW di Asia Tenggara terus meningkat yakni hingga tahun 2011 mencapai US \$ 2,62 milyar. Jika digabungkan dengan remitansi yang diterima dari TKW lain di luar regional Asia Tenggara sehingga menjadi US \$ 6,73 milyar, maka jumlah remitansi menduduki penerimaan terbesar kedua setelah migas dan terbesar pertama disektor jasa.²

Tabel 1.2 : Remitansi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Menurut Negara Penempatan di ASEAN (Juta USD).

Negara	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ASEAN	2.587	2.628	2.711	2.985	2.941	2.655
Malaysia	2.312	2.306	2.321	2.560	2.541	2.553
Singapura	226	261	308	324	303	275
Brunei Darussalam	48	59	75	86	83	73
Negara ASEAN Lain	-	2	7	14	15	7

¹ Bank Indonesia, *Indonesian Financial Statistic : Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan*, http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf

² Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, *Dampak Penempatan TKI 2011*, <http://ppid.bnp2tki.go.id/index.php/informasi-berkala/328-dampak-penempatan-tki-2011>

Sumber : Bank Indonesia³

Meski begitu, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi para agar TKW tersebut mendapatkan perlakuan yang pantas dari negara tempat mereka bekerja. Perlindungan terhadap TKW menjadi isu yang penting, karena meski mendapatkan gaji yang lebih baik daripada saat bekerja di Indonesia, beberapa TKW mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari pemilik usaha atau majikan. Menurut tesis dari Bustomi Arifin yang berjudul *Critical Analysis of Domestic Worker Condition in Malaysia and Singapore: Ameliorated Economic Condition vs. Gateway to Modern Slavery or Servitude*, jenis perlakuan tersebut terdiri dari gaji yang ditahan, dilarang untuk pulang kampung, sampai dengan penyiksaan. Dari 1000 sampel yang dikumpulkan dari para TKW di Singapura dan Malaysia oleh Pushpanathan, memperlihatkan sekitar 80 % dari pekerja dilarang menghubungi keluarga mereka, dan 17 % diantara mereka harus membayar hutang kepada orang yang menyelundupkan mereka secara ilegal.⁴

Hak wanita yang sering terenggut saat menjadi pekerja di luar negeri juga diakui sebagai hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, menyatakan kejahatan *trafficking* atau perdagangan orang rentan terjadi akibat dari konektivitas antar negara tumbuh cepat, seperti di wilayah ASEAN. Sindikat perdagangan orang itu kerap memanfaatkan petugas perbatasan negara untuk

³ Bank Indonesia, *Indonesian Financial Statistic : Remitansi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Negara Penempatan di ASEAN (Juta USD)*, http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_31.pdf

⁴ Kelsey Lee, *The Effect of ASEAN on Human Trafficking in Southeast Asia*, 2013, Blackburn College, Blackburn, hal.17

menyelundupkan para korban perdagangan manusia. Ari menganggap permasalahan paling krusial dan awal saat ini, yaitu akar masalah *human trafficking* yang terletak pada persoalan di perbatasan negara kawasan ASEAN. Untuk itu, kerja sama lintas negara dan instansi mesti segera lebih diintensifkan lagi, baik tukar-menukar informasi maupun *joint investigation*,⁵

Tidak hanya secara ilegal, namun juga dalam perlindungan hak asasi para tenaga kerja yang bekerja di negara anggota ASEAN secara legal juga dirasakan masih kurang. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu yang mengkritisi pemerintah dalam memaksimalkan pengiriman TKW meski perlindungan yang diberikan oleh instansi yang terkait dirasa belum mencukupi. Pada 9 Juni 2016, anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka meminta Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, untuk meminta maaf kepada TKW serta para keluarga mereka, karena menyebut pengiriman TKW hanya sebatas menambah devisa semata. Rieke juga menambahkan ucapan tersebut secara tidak langsung menyebutkan bahwa pemerintah membenarkan perdagangan manusia. Sebelumnya pada tanggal 1 Juni 2016 di acara Rakernas Kadin di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Menteri Perdagangan mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia tidak melulu ekspor barang, namun juga ‘ekspor manusia’ berupa TKW. Menurut Rieke, paradigma berpikir tersebut jelas sesat pikir karena artinya pengiriman TKW mendorong perdagangan

5

Polri: Perdagangan Orang Masih Rawan di Kawasan ASEAN, Tempo, 8 September 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/08/063802684/polri-perdagangan-orang-masih-rawan-di-kawasan-asean>, diakses pada tanggal 2 Maret 2017

manusia. Praktek human trafficking adalah kejahatan kemanusiaan yang menjadi perlawanan bersama dunia, Kalau pun terjadi pengiriman rakyat untuk bekerja di luar negeri tidak bisa dipandang sebagai semata keuntungan ekonomi layaknya ekspor impor barang.⁶

Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait dengan pemulangan pekerja Indonesia di luar negeri melalui Terminal Khusus menunjukkan, setiap tahun sedikitnya 25.000 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami masalah. Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, bahwa pada tahun 2001, terdapat 2.234.143 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 33 di antaranya meninggal dunia. Tahun 2002 tercatat 1.308.765 pekerja Indonesia di luar negeri mengalami kasus, 177 di antaranya meninggal dunia karena kasus kekerasan. Tahun 2005 hingga 2006 terdapat 300 pekerja Indonesia meninggal di luar negeri. Pada tahun 2008, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia menemukan adanya 513 pekerja Indonesia di luar negeri meninggal di Malaysia, dan tahun 2009 Migrant Care mencatat, 1000 lebih pekerja Indonesia meninggal di luar negeri.⁷

Banyak pihak yang menyatakan kepeduliannya terhadap masalah yang dialami oleh TKW di Asia Tenggara. Pihak-pihak tersebut antara lain DPR dari pihak pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Menurut temuan DPR dalam

⁶ Rieke Diah Pitaloka: *Mendag Harus Minta Maaf kepada TKI*, Jitunews, <http://www.jitunews.com/read/39751/rieke-diah-pitaloka-mendag-harus-minta-maaf-kepada-tki> , 9 Juni 2016, diakses pada tanggal 12 Maret 2017

⁷ Adharinalti, *Perlindungan terhadap TKI Irregular di Luar Negeri*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional BPHN, 2012, hal. 8

kunjungan kerja ke Malaysia pada tanggal 9-25 September 2014 menekan perlunya perlindungan yang lebih optimal baik dari pihak pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap para TKW. Pasalnya, DPR menemukan bahwa TKW sering dimanfaatkan dalam berbagai tindakan kriminal seperti narkoba, penculikan, pembunuhan dan perdagangan senjata api. Selain itu, TKW di Malaysia mengalami hal-hal seperti pelecehan seksual dan kekerasan dalam bentuk lainnya. Dalam laporan ini, DPR meminta badan yang terkait untuk tidak mengirimkan TKW sebelum membuat perjanjian tertulis dengan negara bersangkutan, meskipun sama-sama merupakan negara anggota ASEAN.⁸

Dari lembaga swadaya masyarakat, ada Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang merekomendasikan adanya aliansi antara lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan TKW, pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, serta ASEAN. Menurut Komnas Perempuan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia sangat lemah memperhatikan 3 hal berikut yakni minimnya pemberantasan agen TKW yang mendatangkan secara ilegal, dokumen yang lebih sering ditahan oleh para majikan daripada yang tidak, serta agen tenaga kerja yang sewaktu-waktu bisa meninggalkan TKW dan membuat visa kerja yang mereka miliki tidak lagi sah. Untuk itu, Komnas Perempuan menyarankan agar setiap perjanjian bilateral maupun regional yang ditandatangani oleh pemerintah

⁸ DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Laporan Akhir Pelaksanaan Tugas Tim Pengawas DPR RI terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia*, 25 September 2014

Indonesia maupun pemerintah negara tujuan TKW agar diawasi oleh aliansi lembaga swadaya masyarakat dari Indonesia maupun dari negara tujuan.⁹

Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia menganggap perlu adanya kerjasama regional dengan negara-negara yang menjadi tujuan para TKW, terutama negara-negara anggota ASEAN. Untuk melindungi tenaga kerja di dalam negeri, dalam cakupan ASEAN, Indonesia telah menandatangani berbagai deklarasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia terutama yang terkait dengan nasib tenaga kerja seperti Berbagai penyempurnaan terhadap isu ini berlanjut dengan *Declaration on the Elimination of Violence Against Women in The ASEAN Region* tahun 2004, *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children* pada tahun yang sama, serta *ASEAN Committee on the Implementation of the ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* pada tahun 2007.¹⁰ Dengan deklarasi ini, diharapkan Indonesia dan berbagai negara anggota ASEAN bisa menunjukkan bahwa negara-negara tersebut bisa mengaplikasikan standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal ke dalam tataran hukum negara masing-masing. Perlindungan tenaga kerja atau migran sudah masuk ke dalam berbagai produk hukum internasional, seperti CEDAW (*Convention*

⁹ Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) dan Solidaritas Perempuan/CARAM Indonesia, *Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga (TKW-PRT) Indonesia: Kerentanan Dan Inisiatif-Inisiatif Baru Untuk Perlindungan Hak Asasi TKW-PRT*, Laporan Indonesia Kepada Pelapor Khusus PBB, 30 September-3 Oktober 2003

¹⁰ The Southeast Asia Women's Caucus on ASEAN, *An ASEAN Handbook for women's rights activists*, 2013, Chiang Main, Thailand, hal. 13

on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women), BPFA (*Beijing Platform of Action*), dan MDG (*Milennium Development Goals*).¹¹

Demi kesuksesan berjalannya deklarasi tersebut serta konsistensi dari masing-masing negara anggota ASEAN, diperlukan semacam pertemuan rutin yang khusus membahas kemajuan negara-negara Asia Tenggara dalam memajukan isu-isu wanita. Dalam kerangka hak asasi ASEAN yang bernama AICHR (*ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights*), terdapat pertemuan tingkat menteri yang bertugas menjamin berjalannya program hak asasi manusia ASEAN. AMMW (*ASEAN Ministerial Meeting on Women*) merupakan salah satunya, dan bertugas menyusun berbagai rencana kerja yang akan dijalankan oleh ACW (*ASEAN Committee on Women*). Ini adalah pertemuan yang diwakili oleh menteri pemberdayaan wanita masing-masing negara anggota ASEAN.

Indonesia mengambil peran penting di dalam pembuatan AMMW, karena usulan pertama terbentuknya AMMW diajukan oleh Indonesia pada pertemuan ke-8 *ASEAN Committee on Women* (ACW) pada November 2009 di Brunei Darussalam . Pembuatan AMMW membuktikan bahwa ASEAN memberikan perhatian kepada upaya pemberdayaan, pemajuan dan penghapusan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. ASEAN berpandangan perempuan adalah mitra sejajar dengan pria, yang mempunyai peran sama dalam menunjang suksesnya proses pembangunan komunitas ASEAN .

1.2 Rumusan Masalah

Kerjasama secara regional diperlukan untuk melindungi TKW yang berada di negara-negara ASEAN, salah satunya dengan AMMW. Diplomasi multilateral dari AMMW juga menampung aspirasi terkait diskriminasi tenaga kerja migran, termasuk mereka yang berasal dari Indonesia. Sebagaimana dengan negara-negara ASEAN lain, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional terkait wanita. Yang dibutuhkan dalam AMMW adalah kerangka kerja dan keputusan yang memberikan kesempatan bagi para TKW untuk memperbaiki nasibnya, baik di negara tujuan maupun setelah kembali dari tugasnya sebagai migran.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari penjelasan diatas maka penulis mengangkat pertanyaan dari penelitian ini adalah *“Bagaimana Upaya Indonesia Dalam Memajukan Nasib Tenaga Kerja Wanita Melalui Asean Ministerial Meeting On Women (AMMW)?*

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Indonesia turut andil di dalam memajukan nasib tenaga kerja wanita
2. Penelitian ini kemudian dilakukan untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya Indonesia ikut berkontribusi didalam ASEAN Ministerial Meeting of Women

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Menambah referensi dan kepustakaan Ilmu Hubungan Internasional tentang upaya Indonesia dalam menanggulangi masalah TKW Indonesia Melalui Asean Ministerial Meeting On Women (AMMW)

- b. Secara praktis, manfaat yang di dapatkan yaitu lebih berkaitan dengan hasil penelitian yang dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan topik yang dibuat.

1.6 Kajian Pustaka

Karya tulis pertama yang akan peneliti gunakan mengenai sikap masyarakat Indonesia mengenai komunitas ASEAN, adalah paper dari Benny Guido, yang berjudul *Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community*.¹² Paper ini menunjukkan bagaimana keinginan Indonesia mengikuti komunitas ASEAN, tidak diikuti pengetahuan yang cukup dari masyarakat terkait bagaimana ASEAN bekerja.

Meski begitu, dengan munculnya Komunitas ASEAN yang ditandatangani melalui *Bali Concord II*, Pemerintah semakin meningkatkan sosialisasi terkait program tersebut. Hasilnya, dengan program-program seperti meningkatnya investasi dan tumbuhnya pariwisata, semakin banyak orang yang ingin mempelajari ASEAN.

Karya tulis kedua yang akan digunakan untuk menjelaskan visi Indonesia di ASEAN, adalah jurnal dari Felix Heiduk yang berjudul *Indonesia in ASEAN Regional Leadership between Ambition and Ambiguity*.¹³ Sebagai salah satu negara pendiri dari ASEAN, Indonesia mengambil banyak peran penting selama keberlangsungan organisasi regional tersebut, seperti menggalakkan demokrasi, pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik perbatasan, penanganan anti terorisme, dan sebagainya.

¹² Benny Guido, *Indonesian Perceptions and Attitudes toward the ASEAN Community*, Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2011,

¹³ Felix Heiduk, *Indonesia in ASEAN Regional Leadership between Ambition and Ambiguity*, (German Institute for International and Security Affairs, 2016), https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2016RP06_hdk.pdf

Namun, tantangan datang dari luar regional, terutama Tiongkok. Indonesia belum bisa mendorong negara lain untuk mengecah sikap Tiongkok yang mengganggu stabilitas seperti pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif. Hal ini diperburuk dengan sikap mendua, seperti masih berlangsungnya kerjasama ekonomi dengan Tiongkok.

Karya ketiga yang akan penulis gunakan terkait keterlibatan Indonesia terkait HAM, adalah laporan KOMNAS Perempuan Indonesia kepada CEDAW yang berjudul *Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesia, 2007 – 2011*.¹⁴ Laporan ini menjelaskan bagaimana implementasi CEDAW di Indonesia dan saran yang diberikan untuk memantapkan konsistensi implementasi ke tataran hukum Indonesia.

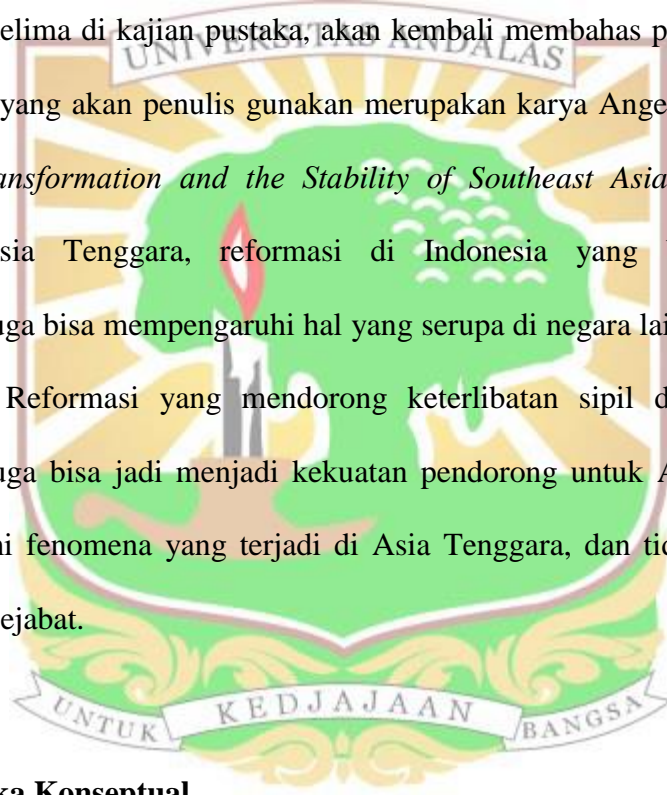
Laporan ini merangkum beberapa peraturan yang dianggap tidak konsisten dengan perlindungan hak asasi wanita di Indonesia, seperti hukuman cambuk di Aceh karena melanggar asusila. Laporan juga mengungkapkan meski peluang kerja bagi wanita semakin banyak dengan kemajuan ekonomi, praktek diskriminatif dalam soal naik pangkat dan gaji masih banyak ditemui, terutama di industri. Paper ini juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan hak wanita, seperti alokasi anggaran khusus untuk memulihkan nama baik wanita yang dituduh melakukan tindakan asusila sekaligus mengintegrasikan mereka dalam kehidupan sehari-hari, dan rekomendasi untuk menghentikan peraturan yang bergesekan dengan CEDAW.

Tulisan keempat di kajian pustaka datang dari Amnesty International, yang mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia terkait hak wanita, berjudul

¹⁴ Komnas Perempuan, *Regarding the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in Indonesia, 2007 – 2011*(CEDAW Committee,2011)

*Briefing To The UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women.*¹⁵ Laporan ini dikeluarkan pada Juli 2012, dan berisi tentang pelaksanaan hukum Indonesia yang dianggap kurang memuaskan, seperti tidak ada kewajiban bagi dinas kesehatan untuk memberikan alat kontrasepsi kepada pasangan yang belum menikah dan hukum syariah yang ada di Aceh, dan hambatan untuk melakukan aborsi secara sehat bagi pasangan yang belum menikah.

Tulisan kelima di kajian pustaka, akan kembali membahas posisi Indonesia di ASEAN. Buku yang akan penulis gunakan merupakan karya Angel Rabasa berjudul *Indonesia's Transformation and the Stability of Southeast Asia*. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, reformasi di Indonesia yang berdampak pada demokratisasi juga bisa mempengaruhi hal yang serupa di negara lain, seperti Filipina dan Kamboja. Reformasi yang mendorong keterlibatan sipil dalam mengawasi pemerintahan juga bisa jadi menjadi kekuatan pendorong untuk ASEAN agar bisa lebih memahami fenomena yang terjadi di Asia Tenggara, dan tidak hanya berupa interaksi antar pejabat.



1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Multi Trak Diplomacy (Diplomasi Multi Track)¹⁶

Gagasan ini dikembangkan oleh Louise Diamond, intelektual dari University Michigan, dan John W. Mcdonald, seorang duta besar asal Amerika Serikat. Dengan

¹⁵ *Briefing to the UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*, 2012, Amnesty International

¹⁶ Ranny Emilia, *Praktek Diplomasi*, 2013, Badouse Media, Bandung, hal. 86

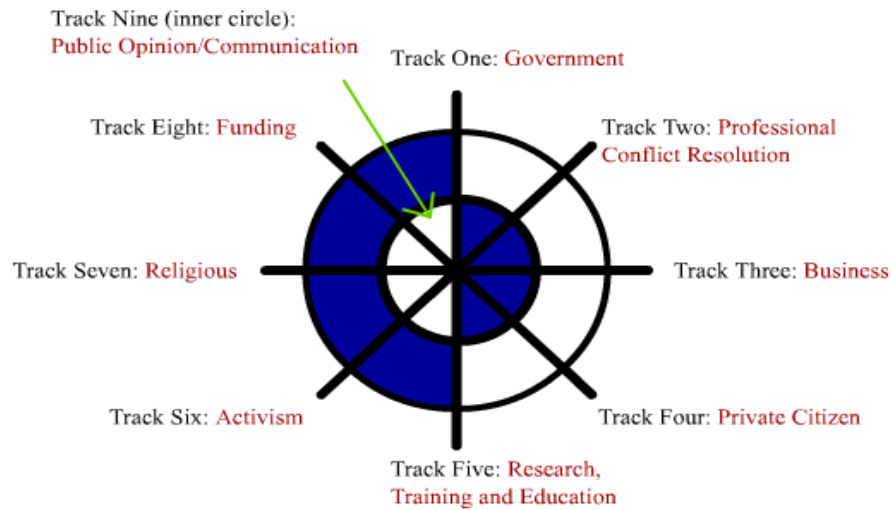
gagasan ini, kedua orang tersebut menegaskan diplomasi tidak hanya terbatas kepada *track one* (pejabat pemerintah, namun juga dengan *track two* (aktivis atau pegiat non pemerintahan). Secara lebih rinci, Louise dan John merangkum total aktor yang terlibat dalam dua *track* tersebut menjadi 9 aktor :

1. Pemerintah
2. Profesional yang terlibat dalam resolusi konflik
3. Bisnis
4. Masyarakat
5. Pelatihan dan Pendidikan
6. Aktivis
7. Pemuka Agama
8. *Funding*
9. Opini dan komunikasi publik¹⁷



Gambar 1.1 : The Nine Tracks of Multi-Track Diplomacy

¹⁷ McDonald, John W.. "Multi-Track Diplomacy." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess. Conflict Information Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: September 2003 <<http://www.beyondintractability.org/essay/multi-track-diplomacy>>.



Sumber: McDonald, John W. "Multi-Track Diplomacy." *Beyond Intractability*. Eds. Guy Burgess and Heidi Burgess

Berikutnya, ada tiga sektor dalam diplomasi menurut Louise dan John, dimana para 9 aktor akan berpartisipasi untuk mensukseskan aksi diplomasi. Tiga sektor tersebut adalah *Political Peace Building*, *Economic and Institutional Building*, dan *Social Peace Building*.

Political Peace Building, diinisiasi oleh *track one*, menurut *United Nation* bertujuan untuk mewujudkan partisipasi dari berbagai unsur di dalam masyarakat untuk mewujudkan situasi yang lebih baik setelah peristiwa-peristiwa seperti perang atau bencana alam terjadi. Beberapa tindakan yang termasuk dalam *Political Peace Building* antara lain mendukung berbagai kebijakan untuk memulihkan situasi paska konflik semisal membersihkan ranjau dan pelucutan senjata, dialog yang bersifat inklusi serta melibatkan semua kelompok kepentingan, memfasilitasi penyediaan

fasilitas dasar seperti air dan makanan, dan memobilisasi mantan kombatan yang bertempur selama konflik kedalam kehidupan sehari-hari.

Economic and Institutional Building bertujuan untuk mendukung pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi dan perangkat pendukungnya seperti infrastruktur. Upaya dukungan tersebut bisa berwujud bantuan finansial asing, asistensi, kegiatan ekonomi yang bersifat komunitas demi memperbaiki kehidupan masyarakat paska konflik. Seperti yang dilakukan Jepang dengan *Jepang International Aid*, untuk mendukung pemulihan negara-negara Asia Tenggara paska bencana gempa dan tsunami tahun 2004 sekaligus untuk meningkatkan investasi pebisnis Jepang di regional tersebut, mereka akan mendukung pembangunan infrastruktur anti gempa dengan tenaga yang terlatih, yang nantinya akan berguna untuk memulihkan aktivitas ekonomi paska bencana.

Social Peace Building merupakan upaya de-eskalasi paska konflik sehingga konflik serupa tidak lagi terulang.

Louise dan John mempercayai bahwa agar *Multi Track Diplomacy* bisa berhasil dan mencapai hasil yang diinginkan, hal-hal dibawah ini harus dipenuhi:

1. Diplomasi hanya dilakukan saat kedua pihak meminta diplomasi dilangsungkan
2. Tujuan diplomasi harus ditetapkan setelah mendengarkan kebutuhan dari semua pihak

3. *Second track* ada bukan untuk mengganggu upaya diplomasi yang dilakukan oleh *first track*
4. Upaya diplomasi semata-mata untuk kebaikan pihak yang terlibat, tanpa keuntungan materi yang berada di luar upaya diplomasi
5. Kemitraan bisa diwujudkan dengan kerjasama komunitas lokal, termasuk menyertakan komunitas yang termarginalkan semisal wanita dan komunitas pribumi
6. Pendekatan dari implementasi hasil diplomasi mengikuti konteks masyarakat sekeliling
7. Tenaga terlatih dari berbagai sektor dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Penelitian lapangan bisa digunakan untuk proses rekonstruksi yang sama
8. Partisipasi tidak hanya menyumbangkan secara materi, namun juga secara keahlian. Pihak-pihak di dalam perjanjian diplomasi tersebut diharapkan bisa melakukan keahlian yang sama di masa depan, melalui pemberdayaan
9. Tujuan akhir partisipasi adalah transformasi. Transformasi merupakan kemampuan untuk memperbaiki kehidupan dengan keahlian dan institusi yang baru.

Diplomasi Multi Track merupakan diplomasi yang melibatkan banyak aktor. Dalam sistem multipilar ini, kemitraan dan kolaborasi adalah kata kuncinya. Agen pemerintah, bisnis dan LSM (atau NGO) saling terintegrasi dalam usaha-usaha pemerintah untuk memberikan layanan diplomasi.

Kemitraan dan kolaborasi bisa dilakukan oleh keempat entitas tersebut jika mereka mampu melakukan hal ini, demi mewujudkan *Multi Track Diplomacy* :

- Pemerintah

Diplomasi yang berasal dari pemerintah, atau biasa disebut dengan *First Track Diplomacy*, dijelaskan oleh de Magelhaes sebagai kontak resmi yang diinisiasi oleh kontak resmi antara pejabat dari dua negara dan merupakan asal muasal kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh masing-masing negara. Masih dari de Magelhaes, diplomasi yang berasal dari pemerintahan berdaulat memiliki beberapa ciri yang mencolok. Ciri-ciri tersebut adalah dalam diplomasi, salah satu pihak bisa menggunakan keunggulan atau kekuatan politik terhadap negara lain yang menjadi salah satu pihak yang akan terikat perjanjian, semisal dengan militer atau embargo. Diplomasi dari pemerintah juga disertai dengan kebebasan untuk menggunakan sumber daya dan aset yang dimiliki untuk memengaruhi hasil perjanjian dan mengetahui segala pemahaman dan pengetahuan mengenai kebijakan dan tindakan negara yang menjadi mitra yang menjadi pihak yang terlibat dalam diplomasi.¹⁸

Negara bisa bekerjasama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya . Dengan bisnis, negara bisa memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* dan program lain yang bisa menguntungkan negara mitra dalam diplomasi baik secara sosial, maupun ekonomi, sehingga bisa menjadi insentif demi suksesnya diplomasi tersebut. Melalui *Inter Track Business Diplomacy*, aktor bisnis bisa merebut simpati masyarakat negara yang menjadi pelaku diplomasi dan mendekati pejabat pembuat

¹⁸ Jeffrey Mapendere, *Track One and a Half Diplomacy and the Complementarity of Tracks*, Carter Centre, hal.3,
http://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/TrackOneandaHalfDiplomacy_Mapendere.pdf

kebijakan secara persuasif dan humanis, jika seandainya mereka ingin membuka usaha baru di negara tersebut.¹⁹

Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), negara bisa mempercepat jalannya proyek-proyek yang bersifat kemanusiaan, terutama paska konflik atau kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk membantu negara dengan ekonomi yang lebih tertinggal. Negara membutuhkan LSM karena LSM memiliki kapasitas untuk mengawasi dan mengawal komitmen pemerintah dalam menyelesaikan konflik maupun menginisiasi proyek pembangunan.²⁰

Diplomasi ini dikembangkan dengan berdasarkan cara pandang bahwa aktivitas diplomatik tidak hanya berlangsung diantara agen-agen pemerintah yang menghubungkan negara dengan negara lain. Selain itu, semakin banyak pertemuan diplomatik yang melibatkan profesional seperti aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat.

- Bisnis

Menurut Conler Tyler, pelaku bisnis bisa menjadi bagian dari diplomasi karena dengan adanya globalisasi, bisnis juga menjadi bagian dari pembuatan kebijakan negara sehingga bisnis harus berinteraksi dengan masyarakat negara yang akan menjadi lokasi mereka beroperasi. Keterlibatan bisnis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi lokal di suatu negara bisa menjadi preseden yang baik bagi

¹⁹ Conler Tyler, *Companies as Peacebuilders: Engaging Communities Through Conflict Resolution*, International Conflict Resolution Centre, Department of Psychology, University of Melbourne, Australia, <https://publications.qld.gov.au/storage/f/2014-02-06T05%3A57%3A27.978Z/ralph-natalie-final.pdf> , hal.7

²⁰ John W. McDonald, *Citizen Diplomacy*, Institute for Multi-Track Diplomacy, https://www.mum.edu/pdf_msvs/v05/mcdonald.pdf, hal.5

perusahaan tersebut, serta bisa memperbaiki reputasi merek yang mereka miliki di mata konsumen.

Malcolm Macintosh, seorang pengamat hubungan internasional, menganggap partisipasi pengusaha untuk membangun masyarakat di negara mereka beroperasi dapat berdampak baik bagi keberlangsungan usaha mereka. Pendidikan, kesehatan yang baik, dan peluang untuk perbaikan ekonomi dapat mengurangi konflik antara bisnis dan masyarakat lokal karena menganggap bisnis hanya menguntungkan pihaknya semata.²¹

Bersama dengan LSM, bisnis bisa saling bekerjasama untuk memperkuat kapasitas pemerintah lokal untuk menyelesaikan berbagai isu, seperti korupsi, keanekaragaman etnis, layanan publik, dan sebagainya. Upaya ini sekaligus akan memperbaiki citra negara asal perusahaan tersebut, sekaligus menjauhkan bisnis dari aktivitas yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan usaha.

- Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam hal ini, setiap individu warga negara bisa berkontribusi dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian. Upaya-upaya seperti aktivitas sukarela, pertukaran pelajar, dan diplomasi warga negara merupakan contoh dari diplomasi yang dilakukan oleh LSM. Kelebihan yang bisa ditemukan adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas membangun dengan atau tanpa partisipasi pemerintah.

²¹ Conler Tyler, *Ibid*, hal. 8

1.8 Metodologi Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.²²

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, Lexy J. Moeleong menyebutkan salah satu syaratnya adalah bersifat deskriptif, yakni data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan angka-angka yang mendukung hasil penelitian yang berupa narasi. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²³

Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi.

Penelitian kualitatif pada penelitian ini akan memusatkan pada proses dari implementasi AMMW dibandingkan hanya menjelaskan poin-poin dari perjanjian AMMW. Ini dikarenakan hubungan poin-poin yang disepakati oleh AMMW akan lebih bisa dipahami jika penelitian ingin bagaimana komitmen pemerintah Indonesia melalui sikap, pandangan, maupun kebijakan. Dengan data-data resmi maupun data-data yang datang dari sumber lain semisal LSM, akan diketahui komitmen pemerintah Indonesia terhadap AMMW.

²²DR. Deddy Mulyana, MA. *Methodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

²³ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007

1.8.1 Batasan Penelitian

Penelitian ini mengambil rentang waktu dari tahun 2012 hingga 2015. Pembatasan waktu ini untuk mengetahui seberapa jauh keterlibatan Indonesia dalam memajukan nasib TKW di dalam organisasi ASEAN. Dengan pembatasan ini diharapkan hasil penelitian dapat mengikuti kontribusi Indonesia dari awal sampai saat ini.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Sementara itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data dan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.²⁴ Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber data yang ada. Data tersebut yang didapat dari beberapa sumber yaitu penelitian-penelitian sebelumnya yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, serta artikel-artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Di mana data-data tersebut berasal dari berbagai sumber, salah satunya yaitu website resmi ASEAN, pemerintah Indonesia, serta laporan pengamatan dari berbagai ahli terkait aktivitas Indonesia dan ASEAN, dalam segi perlindungan perempuan.

Mengingat keanekaragaman sumber informasi yang dapat diperoleh, maka dalam penulisan ini dilakukan seleksi dan pemilihan atas sumber yang dianggap paling relevan dengan tujuan penulisan. Data-data tersebut nantinya akan diolah kembali agar dapat menghasilkan jawaban yang tepat atas permasalahan dalam penelitian ini.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2005, hlm 62.

1.8.3 Unit Analisis

Menurut Mochtar Mas'ood, unit analisis adalah unit yang perilakunya akan diteliti atau yang juga dikenal dengan variable dependen.²⁵ Sedangkan variabel yang dapat mempengaruhi perilaku variabel dependen atau unit analisis disebut dengan variabel independen atau unit eksplanasi.²⁶ Berdasarkan pemaparan di atas, maka unit analisis dari penelitian ini yaitu Indonesia dan segala aktivitas pemerintahan Indonesia di sektor pemajuan dan perlindungan Asia Tenggara.

1.8.4 Level Analisis

Level analisis adalah kerangka kerja yang digunakan untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti utamanya dalam politik internasional. Menurut Patrick Morgan, terdapat lima level analisis dalam melakukan penelitian, yaitu individu, kelompok individu, negara bangsa, kelompok negara dan sistem internasional.²⁷

Sesuai dengan konteks penelitian ini, maka level analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu sistem internasional. Karena dalam konteks ini peneliti akan menganalisis bagaimana upaya Indonesia dalam menyukseskan sektor perlindungan dan pemajuan perempuan sebagai salah satu program ASEAN. Kontribusi yang diberikan oleh Indonesia untuk sektor ini akan menjadi insentif bagi negara Asia Tenggara lain untuk mempromosikan kesetaraan dan kesempatan yang sama, antara warga laki-laki dan perempuan.

²⁵ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi, Pusat Antar Universitas, Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, LP3ES, hlm 110.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif menurut Bogdan & Biklen²⁸ adalah suatu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari pengolahan data adalah dengan mengumpulkan dan memilih data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kemudian, data-data tersebut disusun secara sistematis dan dideskripsikan secara tekstual.

Melalui prosedur kualitatif, berbagai data dan fakta yang diperoleh dari berbagai sumber berupa dokumen resmi pemerintah, jurnal, dan website resmi tersebut dikumpulkan. Kemudian data dan fakta tersebut dicocokkan, dan dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I

Dalam bab pendahuluan ini mencakup latar belakang isu wanita di Asia Tenggara dan deskripsi singkat partisipasi Indonesia dalam pembahasan berbagai isu wanita di dalam ASEAN, khususnya *ASEAN Ministerial Meeting on Women*.

²⁸*Ibid* , hlm 58.

BAB II

ASEAN Ministerial Meeting on Women, Membahas munculnya isu wanita di ASEAN sebagai organisasi regional, sampai dengan kemunculan *ASEAN Ministerial Meeting on Women*.

BAB III

Situasi Tenaga Kerja Indonesia di ASEAN, Bab ini membahas situasi buruh migran di beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia dan Singapura, serta tantangan yang mereka hadapi.

BAB IV

Aktivitas Diplomasi Indonesia di AMMW Dalam Upaya Indonesia Memajukan Nasib Tenaga Kerja Wanita Menggunakan *Multi Track Diplomacy*, Bab ini membahas komitmen Indonesia menjalani AMMW demi memperbaiki nasib para TKW yang pulang ke Indonesia dengan berbagai kebijakan dari berbagai kementerian dan LSM.

BAB V

Kesimpulan, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti.